BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya Pembentukan pemerintahan Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah di dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah baik tingakat pusat maupun tingkat daerah. Intansi-intansi sebagai pelaksana yang di bentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahnya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan social (urip dan yohanes, 2008).

Hasil kerja intansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintah sesuia bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas masing-masing intansi pemerintah tersebut,informasi tentang akuntabilitas pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah berdasarkan informasi tersebut, pemerintah bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan

laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPR/D di setiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan kepala pemerintah(urip dan yohanes, 2008)..

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto,2002) .

Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas pemerintah mendorong pada perbaikan iklim investasi,sedangkan dalam bidang politk akuntabilitas pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (erwan, 2009).

Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai ”pertanggung jawaban”. Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat mendefinisikan istilah accountability

sebagai *"the requirement for government to answer to the citizenry – to justify the raising of public resources and the purposes for which they used*(Bahrullah Akbar, 2011).

Akuntabilitas mengandung makna bahwa hasil dari suatu entitas kedalam bentuk fungsinya, program dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (public disclosure), dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan.

Dalam akuntabilitas pemerintah kegiatan pemerintah tidak hanya berjalan dengan baik, tapi terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang sangat kompleks yang harus diselesaikan oleh pemerintah antara lain, Akuntabilitas Pemerintah yang mengemuka hanya terdapat upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui aturan-aturan, tetapi lemah dalam peningkatan kemampuan aparat (birokrat) dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Universitas Gajah Mada pada 2002 tentang kualitas pelayanan publik sejak otonomi daerah, efisiensi dan keefektifan, renposiviias, kesamaan perlakuan, dan besar kecilnya rente birokrasi masih jauh dari harapan. Perbaikan yang diperlukan dalam konteks mikro di antaranya standar pelayanan yang meliputi indikator penilaian mutu pelayanan pemda, adanya standard operating procedure, pengembangan survei tentang kepuasan penerima pelayanan, dan pengelolaan sistem pengaduan.disini pemerintah belum bisa melaksanakan akuntabilitas dengan baik dilihat dari permasalahan diatas masih terdapat beberapa kendala yang

harus dibenahai antara lain kualitas pelayanan yang lemah (Agus Fanar Syukri, 2010).

Adapun Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit

keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut (deddy dan sherly, 2010).

Audit kinerja merupakan pengujian sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu enntitas untuk menilai suatu pemanfaatann sumber daya alam memberikan pelyanan public secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stekholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja. Uraian di atas menjelaskan bahwa audit sektor publik bisa memperbaiki kinerja entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Fenomena yang terjadi di dalam audit kinerja sektor publik diantaranya yaitu Harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat inherent sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural. Kelemahan pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah. Kelemahan kedua adalah masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif(rinddy, 2010).

Sehubungan dengan audit pemerintah, terdapat penelitian mandiri mengenai pengaruh rewards instrumentalities dan environmental risk factors terhadap motivasi partner auditor independen untuk melaksanakan audit pemerintah. Penghargaan (rewards) yang diterima auditor independen pada saat melakukan audit pemerintah dikelompokkan ke dalam dua bagian penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik (kenikmatan pribadi dan

kesempatan membantu orang lain) dan penghargaan ekstrinsik (peningkatan karir dan status). Sedangkan faktor risiko lingkungan (environmental risk factors) terdiri dari iklim politik dan perubahan kewenangan. Dan juga terdapat masalah yang lain yang harus dibenahi oleh audit kinerja sektor publik yaitu sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan "birokrat tidak mampu berbisnis" ditujukan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik pun tidak luput dari tudingan ini. Organisasi sektor publik pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih.

Aksesibilitas dalam kamus bahasa adalah hal dapat masuk atau hal mudah dicapai, maka aksesibilitas sendiri merupakan penunjang dalam menfasilitasi masyarakat dalam hal mengetahui laporan keuangan pemerintah dimana pemerintah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dimana umum yang mana laporan keuangan pemerintah tiap tahunnya dapat dilihat dan ditinjau untuk melihat kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang mana masyarakat sendiri dapat menilai mana laporan keuangan yang benar dan mana yang salah.

Tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat kesulitan dimana masyarakat yang ingin meninjau sendiri laporan keuangan pemerintah,

permasalah yang terjadi saat ini hanyalah pada tidak adanya akses kepada masyarakat untuk ikut meninjau laporan keuangan. Masyarakat saat ini hanya dapat melihat atau mendapatkan hasil laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK dan pempublikasiannya pun hanya sebatas laopran keuangan yang menunjukkan tingkat-tingkat kecurigaan ataupun yang sudah dicurigai, tidak keseluruhan laporan keuangan pemerintah.

Fenomena yang terjadi pada hal ini ada dalam jurnal penelitian budi mulyana yang mengutip dari penelitian yang serupa dilakukan oleh Steccolini (2002) yang meneliti tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas: apakah laporan tahunan tersebut merupakan medium untuk akuntabilitas. Sampel penelitiannya adalah sejumlah pemerintah daerah di italia. Analisis dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang ignifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan actual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda perlu ditanyakan (budi, 2006).

Maka dari penjelasan diatas penulis mengambil judul **"Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Bandung"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa identifikati masalah dalam penelitian ini adalah:

1 Belum efektif dan efesien dalam pelaksanaan audit kinerja pada pemerintah saat ini.
2. Susahnya aksesibilitas dalam hal laporan keuangan pemerintah yang mana masyarakat ingin mengetahuinya.
3. Belum terdapatnya Akuntabilitas Publik dalam penyelenggaraannya

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1 Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan pada kantor pemerintah kota bandung.
2. Bagaimana pengaruh audit kinerja pada kantor pemerintah kota bandung.
3. Bagaimana pengaruh akuuntabilitas pada kantor pemerintah kota bandung.
4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik pada kantor pemerintah kota bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap aksesibilitas laporan keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan pada kantor pemerintah kota bandung
2. Untuk mengetahui audit kinerja pada kantor pemerintah kota bandung.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pada kantor pemerintah kota bandung.
4. Untuk mengertahui aksesibilitas laporan keuangan dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik pada kantor pemerintah kota bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi penulis

   Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan baik secara teori maupun secara praktek.

2. Bagi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada pihak manajemen dalam rangka perbaikan dan pengembangan dari praktik-praktik yang sudah dianggap memadai

3. Bagi pihak- pihak yang memerlukan

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan judul dalam penyusunan laporan usulan penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan dasar bagi pemerintah kota bandung tentang partisipasi masyarakat

dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung yang berada diBalai kota bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.1

Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Feb 2011	Mar 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan :**						
	a. Membuat outline dan proposal UP	■					
	b. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	c. Menentukan tempat penelitian	■	■				
	d. Sidang Komprehensif	■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	a. Bimbingan UP		■				
	b. Pendaftaran seminar UP		■	■			
	c. Seminar UP			■			
	d. Revisi UP			■			
	e. Membuat outline dan proposal skripsi				■		
	f. Penelitian perusahaan				■	■	
	g. Penyusunan skripsi				■	■	
	h. Bimbingan skripsi					■	■
III	**Tahap Pelaporan :**						
	a. Menyiapkan draft skripsi						■
	b. Sidang akhir skripsi						■
	c. Penyempurnaan laporan skripsi						■